



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HAKAM**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT AKUNTANSI**
3. NHK : **463666**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/70 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1137 m2/70 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **216.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **30.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.909.825.736****F. HARTA LAINNYA** Rp. **185.000.000**

Sub Total Rp. **6.040.825.736**

III. HUTANG Rp. **2.350.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **6.038.475.736**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.